

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan temuan aset tetap terkait pemeriksaan keuangan BPK atas LKPD Kota X berfluktuasi dari TA 2010 s/d 2014, sehingga mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK pada tahun yang bersangkutan.
2. Tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014 Pemda Kota X memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK dengan jumlah temuan aset tetap 8 (2010), 16 (2011), 8 (2013) dan 9 (2014). Tahun 2012 opini yang diberikan BPK meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan dengan jumlah temuan aset tetapnya menjadi 6 kasus.
3. Perkembangan temuan aset tetap berdasarkan jenisnya, di peroleh hasil bahwa jumlah temuan aset tetap yang paling banyak adalah tanah, kemudian diikuti oleh peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Hal ini berarti pengendalian Intern pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tanah masih belum optimal dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku, serta rekomendasi yang diberikan BPK terkait dengan aset tetap belum efektif dilaksanakan.
4. Temuan berulang terhadap aset tetap tahun 2010-2014 terjadi pada jenis aset tetap tanah yaitu; (1) tanah yang dinilai sebesar Rp 1,00 (2) tanah yang belum bersertifikat dan (3) tanah hasil pengkaplingan yang belum tercatat.
5. Pemda Kota X berupaya memperbaiki temuan aset tetap tersebut diantaranya;
  - (a) Melakukan sensus atas kondisi aset yang dikelola oleh seluruh SKPD,
  - (b) Melaksanakan verifikasi dan identifikasi ulang serta pencatatan kembali aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya,
  - (c) Mengidentifikasi terhadap barang hilang/rusak dan memproses penghapusan barang hilang/rusak.

- (d) Membentuk tim penyelesaian dan tim inventarisasi dan pengamanan tanah fasum dan fasos melalui Surat Keputusan Walikota.
- (e) Pengembangan kualitas SDM di bidang pengelolaan aset daerah dengan memberikan pelatihan dalam bentuk diklat.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat memberikan masukan kepada Pemda Kota X untuk segera mempercepat penyelesaian inventarisasi dan pengamanan aset tetap pengkaplingan agar tidak berulang lagi pada tahun berikutnya. Peningkatan pengendalian pada Pemko X dapat lebih difokuskan pada kegiatan pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tanah karena dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset tetap tersebut.

## 5.3 Saran

Bagi Pemerintah Kota X disarankan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terkait aset tetap, diantaranya:

1. Pemerintah Kota X sebaiknya melakukan penempatan pegawai/pejabat sesuai latar belakang pendidikannya, terutama bagi pegawai yang ditugaskan pada bidang pengelolaan dan penatausahaan aset tetap harus berasal dari pendidikan akuntansi.
2. Pelatihan dan diklat pada pejabat pengelolaan dan penatausahaan aset tetap daerah harus terus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi mereka, serta bagi yang telah mendapatkan sertifikasi/pelatihan perlu dilakukan ikatan dinas untuk bersedia ditempatkan pada tugas yang sama untuk beberapa tahun kedepan guna mencegah tingginya tingkat pergantian aparatur pengelolaan aset daerah.
3. Pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) cocok digunakan oleh semua satker untuk menunjang tugas pengidentifikasian barang milik daerah berupa tanah. Melalui SIMANTAP

akan diperoleh informasi mengenai data tanah yang sudah bersertifikat maupun yang belum, lokasi/letak, luas serta penggunaannya.

4. Para Pimpinan Instansi dan seluruh aparatur di lingkungan Pemko X harus menjaga komitmen dan integritas mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat perlu melakukan pengawasan yang komprehensif pada semua bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah secara bersamaan, contohnya saat melakukan pemeriksaan dibidang aset juga dilakukan pemeriksaan pada bidang perbendaharaan terkait belanja modal yang menimbulkan aset tetap serta bidang akuntansi terkait pencatatan dan pelaporan aset tetap.

Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian terkait temuan aset tetap dengan membandingkannya dengan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan (Laporan Hasil Pemeriksaan Buku II) dan Laporan Keuangan (Laporan Hasil Pemeriksaan Buku I), sehingga menghasilkan informasi yang lebih mendalam dari keseluruhan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK RI.

